

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KONSERVATISME
AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia periode 2014-2016)**

**Oleh :
Andika Yulistian
Pembimbing : Azwir Nasir dan Mudrika Alamsyah Hasan**

Faculty of Economics and Business Riau University
Email : andikayulistian15@gmail.com

*The Effect of Corporate Governance and Accounting Conservatism on Tax Avoidance
(Empirical Study of Mining Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in
2014-2016)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Corporate Governance and Accounting Conservatism on Tax Avoidance of the mining companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2014-2016. Corporate Governance was elaborated into audit quality, audit committee, and institutional ownership. The Population of this study is all of mining companies which is listed in Indonesia Stock Exchange. The sample of this study is 45 from 15 companies that meet the sampling criterias and listed in Indonesia Stock Exchange. The analytical technique that is used to perform the hypothesis testing is purposive sampling. Data are analyzed using multiple regression method using SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 25. The results showed that audit quality affect the tax avoidance, it comes from the significance that is 0,001. Institutional ownership affect the tax avoidance, it comes from the significance that is 0,022. Accounting conservatism affect the tax avoidance, it comes from the significance that is 0,001 while the audit committee did not affect the tax avoidance, it comes from the significance that is 0,169.

Keywords : audit quality, institutional ownership, accounting conservatism, audit committee, tax avoidance

PENDAHULUAN

Dalam upaya menyejahterakan negara dalam berbagai aspek, pemerintah Indonesia pastinya membutuhkan dana yang sangat besar. Saat ini, berbagai macam potensi tengah digali untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Namun prediksi para praktisi ekonomi menyatakan bahwa jika Indonesia mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara, itu hanya akan

menjadi hambatan besar dan bumerang dikemudian hari. Hal itu dibuktikan dengan utang luar negeri yang terus meningkat dari November 2016 senilai USD 315,34 miliar hingga awal 2017 yaitu sebesar USD 320,28 miliar. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus berupaya mendongkrak sektor penerimaan dalam negeri.

Terkait dengan penerimaan negara, sektor penerimaan terbesar yang untuk membiayai perekonomian negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1)

Bagi negara-negara yang ada di dunia terutama negara berkembang, pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak.

Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chairil anwar : 23).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (dalam Muh. Arief Efendi : 3) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengaitkan pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang di proksikan melalui kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institut.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati ,2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori , 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurindah (2013) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2015) menemukan hasil yang berbeda yaitu tidak terdapat adanya pengaruh antara kualitas audit dan *tax avoidance*.

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realiable*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Putu Rista (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Moses (2017) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Mardiah, 2017). Kepemilikan institusional mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan (Mardiah, 2017). Dengan adanya kepemilikan saham atas institusional yang mempunyai arus kas lebih memberikan dampak tarif pajak yang tinggi untuk perusahaan. Hal ini memberikan dampak pada sikap

manajemen yang menginginkan pajak yang rendah untuk memaksimalkan jumlah laba perusahaan (Mardiah, 2017). Akan tetapi besarnya saham yang dimiliki institusi cukup besar, membuat institusi mempunyai peran untuk mengawasi, mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajer untuk tidak melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan sendiri (Winata, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2016) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Mella (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah Konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian seorang pihak manajemen perusahaan mengakui pendapatan dan biaya untuk menghadapi segala risiko yang mungkin akan terjadi bahwa sikap optimisme manajemen mengakui biaya atau rugi yang pasti akan terjadi dibandingkan keuntungan atau pendapatan di masa yang akan datang. Manajemen lebih peka mengakui rugi daripada pendapatannya bahwa pendapatan lebih besar kemungkinannya tidak akan diterima tahun ini melainkan akan diterima di periode mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh Bhismo (2016) menemukan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nila Sari (2017) yang menemukan bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki hubungan terhadap *tax avoidance*.

TELAAH PUSTAKA

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak

dengan mengarahkannya pada transaksi bukan objek pajak. (Chairil Anwar : 11). (Hanlon dan Heitzman dalam Maharani, 2015) menjelaskan bahwa *tax avoidance* didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. Pengertian lain disebutkan bahwa penghindaran pajak adalah penggunaan aturan sah untuk memodifikasi situasi keuangan individu dalam rangka untuk menurunkan jumlah pajak penghasilan terutang

Good Corporate Governance

Menurut *Cadbury Committee* (Busyra : 180), pengertian *corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) mengeluarkan *code of good corporate governance*, dimana terdapat lima prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu meliputi lima prinsip yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*)

Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang

agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Menurut Maharani dan Suardana (2014) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Dewi dan Jati (2014) menjelaskan bahwa KAP *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan KAP *Non The Big Four* yang memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan

Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Bapepam Nomor 29/PM/2004 yang telah disempurnakan oleh Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris

Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke- 315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, merupakan awal adanya Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia. Bagian tersebut menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEJ wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan

Kepemilikan Institusional

Setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara

pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain

Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi menurut glossary dalam FASB *Statement of Concept* No.2 (Enni : 23) adalah reaksi yang hati-hati terhadap ketidakpastian dengan mencoba meyakinkan bahwa ketidakpastian resiko yang ada pada kondisi bisnis cukup layak untuk di pertimbangkan.

Konservatisme merupakan prinsip yang paling mempengaruhi penilaian dalam akuntansi (Nurjannah, 2017). Defenisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai aset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi (Anggraini, dkk., 2008). Konsep konservatisme akuntansi menyatakan bahwa untuk menghindari kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang atau keadaan yang yang tidak pasti, manajer perusahaan akan mengambil suatu kebijakan, perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan atas kejadian, konsekuensi atau hasil yang dianggap kurang atau tidak menguntungkan untuk perusahaan

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance*

yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan.. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Chai dan Liu (2010), jika nominal pajak yang dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh sebab itu semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kualitas Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Berjalannya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif dan dapat mendukung adanya *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan *corporate governance* memiliki kemungkinan yang sangat kecil dalam melakukan penghindaran pajak karena memiliki pengawasan dan pengontrolan yang baik

dalam perusahaan tersebut. (Moses dan Nur 2017)

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Komite audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan.

Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (short-term Shareholder) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (longterm shareholder) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian pihak manajemen perusahaan dalam mengakui pendapatannya, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat terjadi kemungkinan akan terjadi. Penggunaan Konservatisme akuntansi akan menyebabkan angka-angka pada laporan

laba-rugi ditetapkan rendah sehingga akan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Semakin rendah pendapatan yang diperoleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang akan dibayarkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : Konservatisme berpengaruh terhadap Tax Avoidance

METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Populasi ini dipilih karena berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pembayaran pajak oleh perusahaan tambang belum sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik dimana yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah yang hanya memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016;
2. Tercatat berturut-turut selama tahun penelitian 2014-2016.
3. Tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian 2014-2016
4. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian ini

Berdasarkan kriteria di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 15 Perusahaan pertahun, sehingga total sampel penelitian selama tahun 2014-2016 menjadi 45

Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya

Tax Avoidance (Y)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Dyreng *et al.* (2010) penghindaran pajak dihitung dengan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 2014). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahun sebelumnya. Oleh Karena itu, kualitas audit diukur dengan menggunakan variable *dummy* yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Water House Cooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, dan *Ernst & Young -E&Y*, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*

Komite audit

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013). Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota diangkat serta diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan pengawas prinsip-prinsip pengawasan interna

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional (INST) adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional yang tertinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut (Desai dan Dharmapala 2006) :

$$\text{INST} = \frac{\text{Jmlh kep saham oleh instl}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

Konservatisme Akuntansi

Konservatisme di ukur dengan menggunakan *accrual ítems* seperti halnya penelitian yang dilakukan Handojo, (2012) dalam penelitiannya untuk mengukur konservatisme dengan menggunakan akrual. Apabila akrual bernilai negatif, maka laba dapat dikategorikan konservatif, hal ini

disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas yang didapatkan oleh perusahaan pada masa atau periode tertentu. Rumus yang digunakan dalam mengukur konservatisme sebagai berikut (Givoly dan Hayn (2000):

$$KON_ACC = \frac{NI - CF}{RTA} \times -1$$

Dimana:

KON_ACC : Tingkat konservatisme akuntansi

NI : Laba tahun berjalan

CF : Arus kas operasi ditambah biaya depresiasi

RTA : Rata-rata total aktiva

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan SPSS versi 25. Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$

Dimana:

Y = Penghindaran Pajak

(*Tax Avoidance*)

X1 = Kualitas audit

X2 = Komite audit

X3 = Kepemilikan

institusional

X4 = Konservatisme

akuntansi

β = Bilangan Kostanta

(harga Y, bila X=0)

e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel *Tax Avoidance* menunjukkan nilai minimum sebesar 0.13, nilai maksimum sebesar 0.99 dengan rata-rata sebesar 0.3796 dan standar deviasi sebesar 0.18408. Pada variabel kualitas audit menunjukkan nilai minimum 0.00, nilai maksimum sebesar 1.00, dengan rata-rata sebesar 0.53 dan standar deviasi sebesar 0.505. Pada variabel komite audit menunjukkan nilai

minimum sebesar 2.00, nilai maksimum sebesar 5.00, dengan rata-rata sebesar 3.0930 dan standar deviasi sebesar 0.52617. Untuk variabel kepemilikan institusional menemukan nilai minimum 0.02, nilai maksimum sebesar 0.95, dengan rata-rata sebesar 0.3687 dan standar deviasi sebesar 0.30428. Kemudian hasil yang ditunjukkan oleh variabel konservatisme akuntansi adalah nilai minimum sebesar 0.02, nilai maksimum sebesar 1.69, dengan rata-rata sebesar 0.6589 dan standar deviasi sebesar 0.49283

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variable residual memiliki distribusi normal. Uji statistik nonparametric *Kolmogorov Smirnov* (K-S) digunakan dalam penelitian ini. Bilaprobabilitas signifikansi > 0.05 maka distribusi datanya normal, dan jika besarnya nilai signifikansi < 0.05 maka distribusinya tidak normal (Ghozali, 2013: 98). Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi untuk *unstandardized residual* sebesar 0.200 lebih besar dari nilai signifikan yang diharapkan yaitu 0.05 ($0.200 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal

Hasil Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linear antara independen yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi maka standar eror koefisien regresi akan semakin besar, akibatnya *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin besar. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *torelance* dan nilai *Variance Inflating factor*

(VIF). Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah nilai besaran *Variance Inflation Faktor* (VIF) <10 dan *Tolerance* $>0,10$ (Ghozali, 2013:106).

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data yang dilakukan, diperoleh nilai VIF untuk variabel kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional dan konservatisme akuntansi menunjukkan nilai sebesar 1.276, 1.476, 1.183, dan 1.137. dapat dilihat bahwa nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10 (< 10) dan nilai *tolerance* sebesar 0.784, 0.678, 0.845, dan 0.879 yang berada diatas 0.10 ($> 0,10$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, yaitu keadaan ketika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (Ghozali, 2013). salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika ada titik pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Dari hasil uji yang diperoleh, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0. Oleh karena itu dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dengan melakukan

metode Durbin-Watson. Nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan $(4 - dU)$ atau $du \leq DW \leq (4 - dU)$, berarti bebas dari Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih besar dari $(4 - dL)$ berarti terdapat Autokorelasi. Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai dL ; $dU = \alpha$; n ; $(k - 1)$. Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan.

Berdasarkan hasil uji statistic terlihat bahwa nilai Durbin-Watson model adalah 1,514. Dari tabel Durbin Watson dengan $\alpha = 5\%$; $n = 43$; $(k - 1)$ didapatkan nilai dU 1,261. Dari nilai tersebut diketahui bahwa $4 - dU = 4 - 1,261 = 2.739$ dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai Durbin Watson 1,514 lebih besar dari 1,261 dan lebih kecil dari 2,739. Artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dari hasil uji yang diperoleh terlihat bahwa nilai t hitung dari masing-masing variabel kualitas audit (X_1), Komite Audit (X_2), Kepemilikan institusional (X_3) dan konservatisme akuntansi (X_4), adalah -3.735, -1.403, 2.394, 3.605 serta signifikansinya masing-masing adalah 0.001, 0.169, 0.022, 0.001

Hasil dari persamaan regresi dari tabel 4.6 adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.515 + (-0.183)X_1 + (-0.071)X_2 + (0.188)X_3 + (0.171)X_4 + e$$

Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan

demikian persamaan regresi yang dihasilkan, baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Dari hasil uji yang di peroleh menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,460 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 46%. Artinya variabel independen yang meliputi kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional dan konservatisme akuntansi mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 46%, sedangkan sisanya 54% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil uji yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar -3,735 dengan signifikansi 0,001 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha/2 = 43 - 4 - 1: 0,05/2 = 38 : 0,025 = \pm 2,024$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (-3,735) > t_{tabel} (\pm 2,024)$ dan Sig (0,001) < 0,05. Jadi dapat dikatakan H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, yang berarti kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil uji yang diperoleh dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar -1,403 dengan signifikansi 0,169 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha/2 = 43 - 4 - 1: 0,05/2 = 38 : 0,025 = \pm 2,024$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Berdasarkan data pada tabel 4.9 tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} (-1,403) < t_{tabel} (-2,024)$ dan Sig (0,169) > 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_{02} diterima dan

H_{a2} ditolak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax avoidance*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil uji yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,394 dengan signifikansi 0,022 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha/2 = 43 - 4 - 1: 0,05/2 = 38 : 0,025 = \pm 2,024$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (2,394) > t_{tabel} (2,024)$ dan Sig (0,022) < 0,05. Jadi dapat dikatakan H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil uji yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,605 dengan signifikansi 0,001 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha/2 = 43 - 4 - 1: 0,05/2 = 38 : 0,025 = \pm 2,024$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Berdasarkan data pada tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} (3,605) > t_{tabel} (2,024)$ dan Sig (0,001) < 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, yang berarti konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan

dari penelitian sebagai berikut : 1. kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 2. komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 3. kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 4. konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Jumlah sampel yang masih sedikit jika di bandingkan dengan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Dalam penelitian ini terdapat beberapa data yang tidak lengkap atau tidak tersedia, sehingga harus memperkecil sampel.
3. Variabel independen struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institusional. Padahal, cakupan struktur *corporate governance* masih luas seperti kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, latar belakang dewan komisaris.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan penambahan jangka waktu penelitian. Dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan relative pendek, oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian agar dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menguji penelitian ini

menggunakan sampel pada industri lainnya seperti manufaktur, agrikultur dan jasa

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi Tax avoidance diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademis dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Wirna Yola. 2014. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Alviyani, Khoirunnisa. 2016. Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014. Universitas Riau
- Arief Efendi, Muhammad,” The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi”, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Amelia, Mella Virgi, Dudi Pratomo dan Kurnia. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial

- Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. ISSN : 2355-9357. Universitas Telkom.
- Anwar Pohan, Chairil, “ Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Cetakan keempat”, Kompas Gramedia, Jakarta, 2016.
- Azheri, Busyra, “ Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory”, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012
- Damayanti, Fitri dan Tridahus Susanto. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Bisnis Dan Manajemen. Vol. 5, No. 2. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Darussalam, Denny Septriadi, 2009, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*, Danny Darussalam Tax Centre : Jakarta.
- Delgado,F.J., Elena, F.J and Antonio, M.A. 2014. *Effective Tax Rates in Corporate Taxation: a Quantile Regression for the EU*. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. 25. 5. 487–496
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia”. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014):249-260
- Diantari, Putu Rista dan Igk Agung Ulupui. 2016. “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*”. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1.Universitas Udayana. Bali.
- Eksandy, Arry. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). Universitas Muhammadiyah. Tangerang
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*”, Edisi Kelima Cetakan Kelima, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hanum, H.R & Zulaikha, 2013. Pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *efektiv tax rate* study empiris pada BUMN 2009 – 2011. ISSN. 2 halaman 1-19.
- Saputra, Moses Dicky dan Nur Fadjrih. 2017. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan *Corporate Governance*

- Terhadap *Tax Avoidance*. ISSN. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 8. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya
- Sandy, Syeldila dan Niki Lukviarman. 2015. Pengaruh Corporate Governance terhadap penghindaran pajak : studi kasus pada perusahaan manufaktur. Universitas Andalas. Padang
- Sari, Nila. Nawang Kalbuana, Dan Agus Jumadi. 2017. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. ISSN 2460-0784. Stie Ahmad Dahlan Jakarta
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. www.ssrn.com
- Savitri, Enni, "Konservatisme Akuntansi Cara Pengukuran Tinjauan Empiris dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya, Cetakan ke 1, Pustaka Sahila Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2010. *Research Methods for Business. A Skill Building Approach*. John Wiley and Sons, Ltd
- Surya, Indra dan Ivan Yustia Vandana, "Penerapan Good Corporate Governance", Cetakan ke 2, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Surat Keputusan Bapepam Nomor 643/BL/2012
- Suwardjono. 2014. *Teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Utami, Nurindah Wahyu. 2013. Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret . Surakarta
- Wahyudi, Dudi. 2014. Pengaruh *good corporate governance* dan pemeriksaan pajak terhadap *tax avoidance*. RPSEP-09
- Winata. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.
- UU KUP nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1.
- www.idx.co.id
- (<https://pwyp-indonesia.org>)
- (www.kompas.com).
- (investigasi.tempo.co/toyota/).